



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HIMAWAN TRI PRATIWI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 631944

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>440.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/108 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>166.500.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
2. MOTOR, HONDA GL MAX Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
3. LAINNYA, PASIFIC SEPEDA MTB Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
4. LAINNYA, POLYGON XTRADA 5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
5. MOBIL, VOLKWAGEN KOMBİ BRAZIL FOODTRUCK CUSTOM Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
6. LAINNYA, SEPEDA LISTRIK UWINFLY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>90.500.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAPAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>707.000.000</b>



III. HUTANG

Rp. 262.355.483

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 444.644.517

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.